



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH
2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN
Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat (25121)
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP	900.1.6.1/05.19.b/bapenda-Rtg/2024
Tanggal	18 September 2024
Dibuat oleh	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 September 2024
Disahkan oleh	 Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs. Yosefriawan NIP. 19650930 198602 1 002
Judul SOP	Tata Cara Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2024. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan (hal2 yg akan terjadi di luar SOP)	Pencatatan dan Pendataan

No	Uraian Kegiatan	Pembina Subid Pembinaan Wajib Pajak/	Pembina Subid Pembinaan Wajib Pajak/	Pelaksana			Materi Buku		
				Pembinaan Wajib Pajak/ Wajib	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemriksaan	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	menerima data Wajib Pajak Baru kemudian menguskan Kasubid Pendaftaran Wajib Pajak/ Wajib Retribusi untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi						Data Wajib Pajak Baru yang telah terdaftar dan mempunyai NEWFD Hasil Pendaftaran Pada		
2	melakukan pertemuan antara lain : a. Membuat draft konsep Penyuluhan dan Sosialisasi b. Mengumpulkan bahan dan materi penyuluhan dan Sosialisasi c. Menguskan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi						Media Cetak dan Elektronik Penyuluhan langsung kepada Work Shop/ Penyuluhan Penyampaian informasi pajak Work Shop/ Penyuluhan Penyampaian informasi pajak - Dasar Hukum Perpajakan - Kebijakan Perpajakan Daerah - Kebijakan Kepala Daerah - Informasi Perpajakan - Jadwal kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi - Pelaksana yang menguasai per	5 Hari	Konsep penyuluhan dan sosialisasi - Materi Penyuluhan dan - Jadwal kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Tim Pelaksana Penyuluhan dan Sosialisasi
3	melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi : Dalam hal Penyuluhan dan Sosialisasi dilaksanakan langsung ke per Wajib Pajak a. Mendatang Wajib Pajak langsung ke lokasi objek pajak b. Penayapan Materi c. Memberikan maklumat bagi wajib pajak daerah lainnya d. Memberikan informasi terkait kebijakan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah Dalam hal Penyuluhan dan Sosialisasi dilaksanakan bersama dengan beberapa a. Memberikan penyuluhan terkait pajak daerah b. Memberikan maklumat bagi wajib pajak daerah lainnya c. Memberikan informasi terkait kebijakan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah Melaporkan hasil kegiatan kepada Kasubid Penyuluhan dan Keberatan						- Materi Penyuluhan Pajak a. Pendaftaran Wajib Pajak b. Pelaporan Wajib Pajak c. Tata Cara Pembayaran Pajak d. Pemeriksaan dan Pengawasan H - Data Informasi kebijakan Pajak - Maklumat Pajak - Leaflet pajak - Berita Acara penyuluhan lang - Surat Undangan - Daftar Hadir Undangan - Materi Penyuluhan Pajak a. Pendaftaran Wajib Pajak b. Pelaporan Wajib Pajak c. Tata Cara Pembayaran Pajak d. Pemeriksaan dan Pengawasan H - Data Informasi kebijakan Pajak - Maklumat Pajak - Leaflet Pajak - Spanduk Hasil kegiatan	6 Hari	Wajib Pajak memahami hak dan kewajibannya Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Wajib Pajak memahami hak dan kewajibannya Notulen / Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Draft laporan hasil kerja pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah
4	Menyunt : - Konsep laporan hasil kerja pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah - Evaluasi hasil penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah - Menyampaikan hasil evaluasi dan Laporan Kegiatan kepada Kepala Bidang						- Hasil notulen setiap kegiatan - Dokumentasi kegiatan Draft laporan hasil kerja pelaksanaan Penyuluhan dan - Hasil notulen setiap kegiatan - Dokumentasi kegiatan	20 Hari	Konsep Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Keberatan

No	No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
			Pembina Subid Pembinaan Wajib Pajak/ W-PPH	Pembina Subid Pembinaan Wajib Pajak/ W-PPH	Kasubid Pembinaan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output	
			1	2							
5.	Barang Pajak Daerah	menganalisis dan menyetujui Laporan hasil kerja pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah							Konsep Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Keberatan	1 hari	Laporan hasil kerja pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah
6.	Mengusulkan	Mengusulkan Kasubid Pembinaan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi untuk menata ulang dalam laporan hasil penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah							Laporan hasil kerja pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	4	Arsip

DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan	No.	Tanggal Revisi	Perubahan